

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selaras dengan pembangunan nasional, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah hal ini menunjukkan baik atau tidaknya kinerja pemerintah daerah. Kemampuan mengelola adalah mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh poses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(BPS, Lampung)

Pendapatan dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak (pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional), penerimaan bukan pajak (dari SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, maupun lainnya), dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan tersebut berasal dari masyarakat sehingga sudah seharusnya pemerintah mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap amanah yang diterima pemerintah mengarah pada pemenuhan prinsip akuntabilitas. Dalam rangka tercapainya prinsip akuntabilitas tersebut maka diterapkan prinsip transparansi sehingga informasi yang ada di pemerintahan bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD,

neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2006). Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat dipahami (Susantih dan Saftiana, 2008).

Musgrave (2003) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya (Susantih, Saftiana, 2008).

Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang

belum dilandasi oleh peraturan kepala daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan.

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemda masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemda dapat diketahui bagaimana kinerja

pemda yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemda sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dalam meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2008) melakukan penelitian di daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan dengan judul Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Susantih dan Saftiana (2008) menggunakan kinerja keuangan daerah meliputi tiga indikator, yaitu kemandirian daerah, efektifitas, dan aktifitas keuangan daerah pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Hasil penelitian analisis kinerja keuangan daerah terhadap Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas, dan aktivitas keuangan daerah tidak ada perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan yaitu Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu.

Sejalan dengan penelitian tersebut, dan juga sehubungan dengan pemilihan Provinsi Lampung menjadi objek dalam penelitian ini, selain karena Kemendagri menilai APBD 2011 Lampung sebagai salah satu yang terbaik dari seluruh APBD di Indonesia, selain total anggaran yang menembus angka hingga Rp 2,162 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung juga berhasil melampaui dana perimbangan dari pemerintah pusat yang dialokasikan Rp 987 miliar. Pada 2010,

PAD Lampung mencapai Rp 1,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan tren Provinsi Lampung yang terus berkembang. (www.radarlampung.co.id) Selain hal tersebut BPS Provinsi Lampung mempublikasikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2013 sebesar 5,97%. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding Tahun 2012 yang mencapai 6,53%. Hal ini merupakan gejala nasional, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global. (BPS Lampung, 2014)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik dan ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah di daerah Se-Provinsi Lampung dengan membandingkan data keuangan dimulai dari periode 2008-2013 di setiap daerah Se-Provinsi Lampung. Dengan perkembangan perekonomian yang dicapai saat ini, kabupaten dan kota di provinsi Lampung masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga di alami provinsi yang lain, khususnya kota yang sedang berkembang, dan sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Kondisi setiap daerah yang tidak seragam juga berpengaruh menimbulkan keberagaman kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang akan dilakukan merupakan data keuangan daerah Se-Provinsi Lampung dengan data keuangan periode tahun 2008 sampai dengan 2013 dimana data tersebut diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan berjudul: "**Perbedaan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung**".

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung yang mempunyai laporan keuangan secara lengkap.
2. Data penelitian ini adalah total pendapatan daerah, pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan belanja daerah karena data statistik ini saling berkaitan satu sama lainnya dalam kinerja keuangan Provinsi Lampung.
3. Data penelitian yang akan diambil adalah tahun 2008 sampai dengan 2013 sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kinerja keuangan Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Provinsi Lampung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulis mengenai perbandingan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung.

2. Bagi aparat pemerintahan

Penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan indikator kinerja keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan data tambahan serta menjadi wawasan pengetahuan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung.